

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA), KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang)

Lynda ^{*1}

Dr. Meinarni Asnawi, SE, M.Si, CBV, CMA ²

Bill J. C. Pangayow, SE, M.Si.Ak., CA ³

^{*1,2,3} *Program Studi Magister
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Cenderawasih*

**Corresponding Author*

Abstract

The research entitled "The Influence Of The Implementation Of Regional Financial Management Information Systems, The Quality Of Human Resources, The Application Of Accounting Standards And Government's Internal Control System On The Quality Of Regional Financial Reports" aims to identify to study how the quality of human resources, the implementation of regional financial management information systems, the application of accounting standards, and the government's internal control system whether simultaneously or partially affecting the quality of regional financial reports of Pegunungan Bintang regency. The causal approaches were used to analyze the connection between independent and dependent variables or others. While the Multiple Linear Regression Analysis as an analysis tool in this study was used to measure the effect of independent variables on the dependent variable. The result of this study indicates that the implementation of regional financial management information systems (X1) has 2,845 with a significant level of 0,006, which means the implementation of regional financial management information systems has a significant influence on the quality of regional financial reports of Pegunungan Bintang regency. Meanwhile, the independent variable of the quality of human resources (X2) has 3,084 with 0,003 significance level, it explains that the quality of human resources has impacted significantly on the quality of regional financial reports of Pegunungan Bintang regency. As long as, the applications of accounting standard (X3) have a significant effect on the quality of regional financial reports of Pegunungan Bintang regency with 3,454 and 0,001 significance level. Furthermore, the Government's Internal Control System variable (X4) with a value of 2,487 and a significant level of 0,015, that indicates, Government's Internal Control System variable has significantly affected the quality of financial reports of Pegunungan Bintang regency. While the value of F measurement has greater than the value of F table (29,165 > 5,921), which explains that the quality of human resources, the implementation of regional financial management information systems, the application of accounting standards and government's internal control system simultaneously have a significant effect on the quality of regional financial reports of Pegunungan Bintang regency.

Keywords: *Implementation Of Regional Financial Management Information Systems; The Quality Of Human Resources; The Application Of Accounting Standards; Government's Internal Control System; and The Quality Of Regional Financial Reports*

¹ Alumni Program Studi Magister Akuntansi FEB Uncen

² Dosen Program Magister Akuntansi FEB Uncen

³ Dosen Program Magister Akuntansi FEB Uncen

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah membutuhkan sumber daya guna menggerakkan aktivitas pembangunannya sendiri baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemerintah sebagai aktor yang menjadi penggerak utama pembangunan tentunya akan mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan cara yang terbaik.

Dari sisi sumberdaya finansial, tentunya pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya finansial wajib menyusun laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010. Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah akan memberikan informasi mengenai keadaan keuangan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang memiliki kaitan maupun yang berkepentingan.

Laporan keuangan sebagai suatu bentuk informasi tertulis tentang keuangan Pemerintah Daerah pada suatu periode akuntansi, tentunya harus memiliki akuntabilitas dan transparansi sebagai mewujudkan tata kelola keuangan yang baik yang merupakan bagian dari upaya pencapaian Good Governance. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 maka suatu laporan keuangan pemerintah daerah meliputi : (1) Laporan realisasi anggaran, (2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (5) Laporan arus kas dan (6) Laporan perubahan Ekuitas (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun penyusunan laporan keuangan diarahkan untuk menyusun dengan berbasis Akruwal.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus berada dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan yang mana kualitasnya ditentukan oleh berapa indikator. Menurut Mahsun dan Sulistiyowati (2011) mengemukakan laporan keuangan pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yakni anatara lain : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Dengan demikian kualitas laporan keuangan dapat dilihat melalui indikator, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selanjutnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tentunya akan ditentukan oleh berbagai faktor seperti kondisi sumberdaya manusia, teknologi yang digunakan, sistem pengendalian dan sebagainya.

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada PSAP. Penerapan PSAP harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi di semua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Isi dari PP No.71 Tahun 2010, dimana didalamnya tidak hanya memuat standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akruwal di lampiran I tetapi juga SAP berbasis kas menuju akruwal di lampiran II. SAP berbasis kas menuju akruwal pada lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan SAP berbasis akruwal, batas akhir penggunaannya 2 sampai dengan tahun anggaran 2014, artinya di tahun anggaran 2015 sudah harus menggunakan SAP lampiran I.

Salah satu struktur SAP penting yang akan kita bahas adalah PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang berisi Tujuan Laporan Realisasi Anggaran, ruang lingkup Laporan Realisasi Anggaran, Manfaat informasi Realisasi Anggaran, Struktur Laporan Realisasi Anggaran, Periode pelaporan, Isi Laporan Realisasi Anggaran, Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi, Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota, Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

Penerapan PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan OPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu.

Menurut Udiyanti et al (2014) dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi, dan persyaratan hutang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Surastiani & Handayani, (2015) menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila mampu memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, sebaliknya apabila pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kriteria karakteristik kualitatif tersebut maka pemerintah daerah tidak mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Akibat ketidakmampuan ini dapat mengakibatkan terjadinya potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif.

Notoatmodjo, Soekidjo (2009) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan aset utama pembangunan. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah penggerak aktivitas dan tanpa sumber daya manusia maka tak akan ada aktivitas yang dapat berjalan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumberdaya manusia juga disebut tenaga kerja atau karyawan. Dengan demikian maka pengembangan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat terus berkembang dan bersaing dalam kompetisi dengan lingkungan oragnisasasi. Pengembangan tenaga kerja adalah upaya merencanakan, meningkatkan kemampuan, dan mengelolanya sehingga timbul produktivitas yang tinggi. Selain itu sumber daya manusia berperan sangat penting dalam upaaya suatu organisasi dalam mengurangi kesalahan dalam perhitungan.

Teknologi menjadi sesuatu yang penting dalam memperlancar dan meningkatkan kualitas aktivitas organisasi. Teknologi Sistem Informasi manajemen saat ini sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam aktivitas oranisasi sebagai bagian meningkatkan kualitas laporan aktivitas. Demikian juga halnya dengan pengelolaan keuangan daerah dimana sistem informasi manajemen keuangan daerah telah digunakan dalam aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Secara umum Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) menurut Jurnal dan Supomo (dalam Indriansari, 2008) terdiri dari; perangkat, Pengelolaan Keuangan dan perawatan.

Pengendalian intern merupakan bagian dari fungsi manajemen guna memastikan bahwa semua proses aktivitas sejalan dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Pemerintah sebagai sebuah oraganisasi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian agar seluruh aktivitas pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dari sisi pengertian maka pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Mulyadi (2008) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa suatu sistem pada prinsipnya terdiridari sruktur organisasi, metode dan ukuran yang harus saling terkait dan terkordinir.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang baru menerapkan aplikasi SIMDA tahun 2018 dalam penyajian laporan keuangannya, dimana sistem informasi yang digunakan Sebelumnya adalah: aplikasi SIMAKDA dan SIADINDA. Hasil penerapan SIMAKDA DAN SIADINDA ini tidak memberikan perubahan dalam opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dimana pada tahun 2011 mendapat Opini Tidak Wajar (TW) dan mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan demikian Kabupaten Pegunungan Bintang belum pernah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dalam laporan keuangannya. Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerapkan Aplikasi SIMDA diharapkan dalam pengelolaan keuangannya dapat mengalami perubahan yang berarti karena dalam mencapai kualitas laporan keuangannya dari sisi Opini BPK (Laporan Hasil Penilaian Kabupaten Pegunungan Bintang, 2018).

Berdasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa pengaruh SIMDA, Sumber Daya Manusia, terhadap Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk menguji pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk menguji pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk menguji pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi SIMDA, Penerapan Standar Akuntansi, Penerapan SPIP secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. Kajian Pustaka

2.1 New Public Management

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *lean management* (Denhardt, J,V, 2003) *New Public Management* (NPM) dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. *New Public Management* (NPM) secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

New public management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. *New Public Management* memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih 12 mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

2.2 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Terdapat beberapa Pengertian dari sistem informasi manajemen yang dikemukakan dalam berbagai literatur. Menurut Azar Susanto (2009) “ Sistem informasi Manajemen merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan. Yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengambil keputusan”.

Dengan melihat manfaat dari sistem informasi manajemen maka dapat diketahui bahwa sistem informasi manajemen mampu memberikan efektifitas kerja dan meningkatkan kualitas hasil kerja dari suatu organisasi jika dapat dimanfaatkan dengan baik.

2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIMDA)

Menurut Budiman, Fuad dan Arza Indra (2013) SIMDA merupakan salah satu produk teknologi informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel.

Sebagaimana diketahui bahwa aplikasi SIMDA merupakan aplikasi data base yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). SIMDA pada dasarnya merupakan suatu system berbasis komputer yang dikembangkan dengan memperhatikan implementasi dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan demikian pengendalian terhadap aplikasi SIMDA menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SIMDA dalam menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.4 Pengertian Tentang Sumber Daya Manusia

Menurut Wirawan (2015) Sumber manusia adalah: "Orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang berkerja dalam suatu organisasi. Sumber Daya manusia menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Efektifitas dan efisiensi Sumber-sumber organisasi hanya dapat dicapai kalau sumber daya manusianya berkualitas ". Dari pengertian yang dikemukakan menunjukkan betapa pentingnya sumberdaya manusia dalam suatu organisasi, karena tanpa sumberdaya manusia maka aktivitas organisasi tidak dapat berjalan.

2.5 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraha, 2010). Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan (Sari, 2013). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemeirntah Daerah (LKPD). Standar akuntansi pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan diberi judul, nomor, dan tanggal efektif (Nurlaila, 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Sari, 2013). Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan (Nugraha, 2010).

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjadi dasar dari penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Peraturan ini kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintah pernyataan No.1 Penyajian Laporan Keuangan Ruang Lingkup butir 4 menyebutkan bahwa : " Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan

keuangan konsolidasi, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Dalam pernyataan ini jelas bahwa standar akuntansi pada pemerintah daerah juga berbasis akrual. Dari pernyataan ini maka pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangannya harus memenuhi standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan, dan standar akuntansi pemerintahan ini tidak berlaku untuk perusahaan daerah.

2.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Mulyadi (2010) mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai berikut: “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memberikan pengertian pengendalian intern sebagai berikut: “Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal pemerintah adalah pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”.

2.7 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Erlina Rasdianto (2013) memberikan pengertian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut: “Laporan keuangan Pemerintah daerah adalah hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hasil suatu proses identifikasi dan pengukuran serta pencatatan seluruh transaksi ekonomi dalam nilai uang dari entitas akuntansi pada suatu pemerintahan. Laporan keuangan ini selanjutnya digunakan untuk memberikan informasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya keuangan dan juga sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh SIMDA dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Penggunaan teknologi informasi dalam suatu aktivitas organisasi sudah menjadi suatu keharusan sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika organisasi dewasa ini. SIMDA sebagai salah satu bentuk dari penerapan teknologi informasi dalam manajemen keuangan daerah tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas dari suatu laporan keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Menurut Azar Susanto (2009) tujuan dari sistem informasi yaitu menyediakan informasi yang diperlukan yang dapat digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan.

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Liris S. dkk (2016) dalam penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya penelitian Risma Sri Mutiarani (2016) dan Harlinda (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas SDM terhadap Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut.

H1: SIMDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.2 Pengaruh Kualitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas sumberdaya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, dapat dilihat melalui tingkat kompetensi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah maka OPD sebagai entitas akuntansi memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, dimana laporan keuangan ini dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah selaku entitas pelaporan. Penelitian yang dilakukan Lilis S. dkk (2016) menunjukkan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sintike M.Modo, David P.E.S dan Agus T.P (2016) dalam penelitiannya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Data dalam penelitian berasal dari sumber primer yang diambil dari 146 responden dari 25 OPD, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan teknologi informasi, Kualitas Sumberdaya Manusia dan Komitmen Organisasi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut. Harlinda (2016) meneliti tentang pengaruh Sumberdaya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, komitmen organisasi, pemahaman akuntansi, faktor eksternal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sumber data penelitian ini adalah data primer dari 83 OPD dengan jumlah sampel sebanyak 166 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sumberdaya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern, pemahaman akuntansi dan faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan

H2: Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Standar Akuntansi merupakan suatu bentuk pedoman yang harus dipatuhi dan sebagai patokan dalam melaksanakan fungsi akuntansi dalam suatu organisasi. Demikian tujuan dari penerapan standar Akuntansi adalah mendorong agar aktivitas akuntansi dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan pedoman standar yang ditetapkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Lailatul Khusnah, (2015). Dalam penelitiannya membahas tentang Pengaruh Standar Akuntansi, Audit Intern, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel Intervening pada OPD Pemerintah Kabupaten Malang. Data penelitian adalah data primer dengan jumlah sampel sebanyak 145 orang dari 77 OPD. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak berstrata proporsional. Alat analisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa; variabel Standar Akuntansi, Standar Akuntansi, Komitmen organisasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Adapun variabel Audit Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Lailatul khusnah, (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut.

H3: Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.4 Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah adalah entitas pelaporan sehingga pemerintah sangat memerlukan pengendalian intern terhadap OPD yang ada selaku entitas akuntansi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dimana dinyatakan bahwa penerapan SPIP dapat memberikan keyakinan terhadap keterandalan informasi laporan keuangan kepada para

stakeholder. Dengan demikian maka SPIP menjadi sesuatu yang penting dan menjadi suatu bagian penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Risma Sri Mutiarani (2016) membahas pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan analisis Regresi Linear Berganda. Adapun data yang digunakan adalah data primer dengan jumlah responden sebanyak 38 orang, dengan pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas Sumberdaya Manusia, SIMDA dan SPIP secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Lailatul khusnah, (2015) dan Risma Sri Mutiarani (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan kajian teoritis yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut.

H4: SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.5 Pengaruh SIMDA, Kualitas SDM, Standar Akuntansi, dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

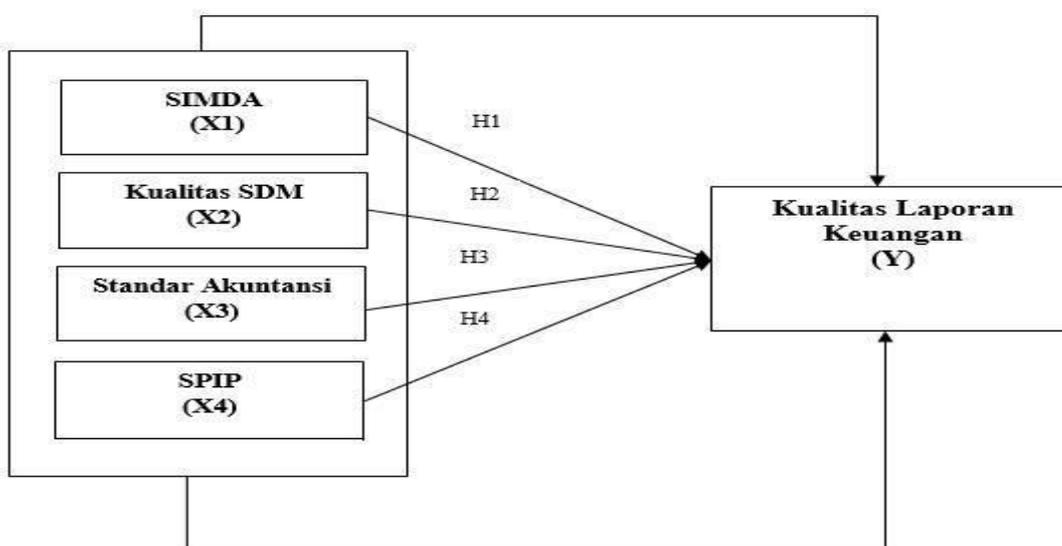
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas terkait dengan ada tidaknya pengaruh SIMDA, Kualitas SDM, Penerapan Standar Akuntansi dan SPIP terhadap Laporan Keuangan pemerintah Daerah. Dengan demikian maka Hipotesis penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menjawab rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

H5: Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara simultan berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah.

2.9 Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1
Model Penelitian



3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah penelitian kausal yang berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kausal menguji hubungan sebab akibat jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data utama yang akan dianalisis dalam penelitian pada dasarnya adalah data kualitatif yang dijadikan kuantitatif melalui skoring dengan pengukuran skala likert. Hal ini dilakukan guna mengakomodir alat analisis yang akan dilakukan, yaitu alat analisis statistik dengan model analisis linear berganda. Adapun data penunjang sebagai bahan untuk pembahasan dan data gambaran umum obyek penelitian adalah data kuantitatif.

Sumber data analisis utama dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari sumber primer. Data ini dikhusus untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data primer ini dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau obyek penelitian dalam hal ini adalah dari responden.

3.3 Populasi dan Sampel

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Dengan demikian maka unit analisis dalam penelitian adalah setiap individu yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah, yang dalam hal ini adalah Individu yang bertindak sebagai Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran. Sedangkan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 25. Dengan demikian dari jumlah OPD dan Unit Analisis maka jumlah Populasi dari penelitian ini berjumlah 3 orang x 25 = 75 orang.

Metode penentuan ukuran/jumlah sampel; Adapun jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada (sampel jenuh), sebanyak 75 orang. Dengan demikian metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh.

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (X1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X2), Penerapan Standar Akuntansi (X3), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X4). Penjelasan dari masing-masing variable independen diatas sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan adalah laporan yang memenuhi karakteristik andal, relevan dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
2. Kualitas sumberdaya manusia adalah sumber daya manusia yang memiliki; pendidikan yang memadai, pemahaman tentang akuntansi, , pemahaman atas peran dan tanggung jawab, pelatihan keahlian dalam tugas, pemahaman peraturan dan pemahaman tentang struktur organisasi. Dalam hal ini Sumber Daya Manusia adalah Staf dibagian keuangan (PPK).
3. Standar Akuntansi suatu standar yang memenuhi : PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas, PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas, PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi, PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan,

PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu sistem yang memiliki; Standard Operating Procedure (SOP), implementasi PP No. 60, dokumen dan catatan yang memadai, pemisahan wewenang dan tindakan disiplin atas pelanggaran.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y)

3.5 Metode Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun model regresi Linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Laporan Keuangan

B₀ = Koefisien Regresi

X₁ = SIMDA

X₂ = SDM

X₃ = Standar Akuntansi

X₄ = SPIP

e = eror

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner, sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada OPD Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 25 OPD, dari setiap OPD peneliti mengambil sampel 3 orang yaitu Kepala OPD, PPK dan Bendahara Pengeluaran. Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner sebanyak 75, dari 75 kuesioner tersebut, hanya 71 kuesioner yang dikembalikan dan diolah, sedangkan 4 kuesioner tidak dikembalikan kepada peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Distribusi Kuesioner

Kuesioner yang didistribusikan	75 responden	100 %
Kuesioner yang tidak dikembalikan	4	5,33%
Kuesioner yang dapat diolah	71	94,67%

Sumber : Data Diolah, 2019

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel statistik deskriptif menunjukkan angka kisaran teoritis dan sesungguhnya, rata-rata dan standar deviasi. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan statistik deskriptif sejumlah 71 responden.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2, dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mempunyai nilai standar error yang paling dominan yaitu sebesar 0,69860, adapun

nilai kisaran teoritis minimum sebesar 25.00 sampai dengan 50.00 dengan nilai rata-rata sebesar 40.4507 dan standar deviasi sebesar 5.88652.

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
SIMDA	71	37.00	13.00	50.00	41.2817	.69031	5.81668	33.834
SDM	71	19.00	26.00	45.00	35.8451	.49327	4.15640	17.276
SAP	71	21.00	29.00	50.00	41.0986	.46709	3.93575	15.490
SPIP	71	25.00	25.00	50.00	40.4507	.69860	5.88652	34.651
KUA	71	15.00	30.00	45.00	37.5493	.46650	3.93079	15.451
Valid N (listwise)	71							

Sumber : data diolah, 2019

4.3 Hasil Analisis Linear Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi manajemen daerah (X1), sumber daya manusia (X2), standar akuntansi pemerintah (X3), sistem pengendalian intern pemerintah (X4) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Ringkasan hasil analisis regresi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisiensi β	t _{hitung}	Signifikan	Keterangan
<i>Constant</i>	7,663			
SIMDA	0,207	2.845	0.006	Signifikan
SDM	0,347	3.084	0.003	Signifikan
SAP	0,442	3.454	0.001	Signifikan
SPIP	0,194	2.478	0.015	Signifikan
α		= 0,05		
R		= 0,799		
Koefisiensi Determinasi (R^2)		= 0,639		
F-Hitung		= 29,165		
Signifikan		= 0,000		
t _{tabel}		= 1,666		

Sumber : Data Diolah, 2019

Hasil regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 4.22 adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,663 + 0,207X_1 + 0,347X_2 + 0,442X_3 + 0,194X_4 + e$$

Dimana :

Y : Kualitas Keuangan Pemerintah

Daerah X₁ : Sistem Informasi Manajemen

Daerah X₂ : Sumber Daya Manusia

X₃ : Standar Akuntansi Pemerintah

X₄ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Koefisien Determenasi (R^2)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the	Durbin-Watson
				Estimate	
1	.799 ^a	.639	.617	2.43337	1.989

a. Predictors: (Constant), SPIP, SIMDA, SDM, SAP

b. Dependent Variable: KUA

Sumber : data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui besarnya koefisiensi korelasi (R) sebesar 0,799 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel sistem informasi manajemen daerah (X_1), sumber daya manusia (X_2), standar akuntansi pemerintah (X_3) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_4) sebesar 79,9% sedangkan nilai *Adjust R square* atau nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,639 yang berarti bahwa variabel independen (sistem informasi manajemen daerah, sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah) mampu menjelaskan variabel dependen (kualitas laporan keuangan daerah) sebesar 63,9% dan selebihnya sebesar 36,1% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5
ANOVA(b)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	690.774	4	172.693	29.165	.000 ^a
Residual	390.804	66	5.921		
Total	1081.577	70			

a. Predictors: (Constant), SPIP, SIMDA, SDM, SAP

b. Dependent Variable: KUA

Sumber : data diolah, 2019

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), sedangkan nilai derajat bebas (*degree of freedom = df*) numerator 4 dan denominator adalah 66. Nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), numerator 4 dan denominator 66 adalah sebesar 5,921. Nilai F hitung berdasarkan hasil perhitungan komputer adalah sebesar 29,165. Apabila membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel, diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($29,165 > 5,921$), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem informasi manajemen daerah, sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6
Hasil Uji Parameter Individual (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.663	3.110		2.464	.016
SIMDA	.207	.073	.306	2.845	.006
SDM	.347	.113	.367	3.084	.003
SAP	.442	.128	.442	3.454	.001
SPIP	.194	.078	.290	2.487	.015

a. Dependent Variable:

KUA

Sumber : data diolah 2019

Dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 21.00, didapatkan statistik uji t terhadap sistem informasi manajemen daerah (X_1) sebesar 2,845 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,845 > 1,666$) dengan signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pada variabel sumber daya manusia (X_2) didapatkan statistik uji t sebesar 3,084 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($3,084 > 1,666$) dan juga signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pada variabel standar akuntansi pemerintah (X_3) didapatkan statistik uji t sebesar 3,454 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($3,454 > 1,666$) dan juga signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selanjutnya pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_4) didapatkan statistik uji t sebesar 2,487 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015. Nilai statistik uji t_{hitung} tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,487 > 1,666$) dan juga signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.5 Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggung jawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus berkualitas, yakni yang

memenuhi karakteristik kualitatif yaitu, andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipercaya. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kemudian disempurnakan lagi dengan terbitnya PP No. 71 tahun 2010. Dalam PP tersebut secara jelas dinyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Pemerintah mengharapkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang SAP diatas dapat membantu para pengelolaan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat memenuhi akuntabilitas publik. Dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dari penerapan sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika penerapan sistem informasi manajemen daerah semakin baik maka akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiarani dan Harlinda (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara SIMDA terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil koefisien determinasi ini terlihat bahwa walaupun pengaruh dari penerapan sistem informasi manajemen daerah sudah cukup besar, namun pengaruh dari variabel lain juga cukup dominan. Ini berarti bahwa selain sistem informasi manajemen daerah, masih banyak hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Hasil temuan penelitian mengenai SIMDA pada OPD Kabupaten Pegunungan Bintang masih terdapat kendala mengenai pengoperasian teknologi informasi oleh pegawai pada OPD. Hal ini perlu adanya pelatihan khusus mengenai sistem informasi yang digunakan. Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah di tingkat pelaporan ataupun tingkat akuntansi (OPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Sehingga kedepannya diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan sosialisasi yang lebih intens agar kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat lebih ditingkatkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menunjang sistem informasi keuangan daerah oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu menunjang kelengkapan perangkat teknologi informasi berupa komputer, memperbaiki jaringan informasi menjadi lebih efektif dan menyediakan tim IT guna pengoperasian jaringan internet.

Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis S. dkk (2016) menunjukkan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung dengan pendapat Kaho (2010) yang menyatakan bahwa Sumber

Daya Manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi otonomi daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang memiliki kompetensi SDM yang baik sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena dapat menerapkan logika akuntansi dengan baik dan benar. SDM yang berkompeten juga menggunakan pengetahuannya untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, menggunakan keterampilannya untuk menjalankan tugas dengan baik dan benar juga menghindari kekeliruan penerapan prinsip akuntansi dan menunjukkan sikap yang baik kepada semua orang.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa, pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang masih menggunakan konsultan dalam pelaporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, sumber daya yang ada pada OPD Kabupaten Pegunungan Bintang belum mandiri untuk menyusun laporan keuangan daerah. Dari hasil penelitian berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang bahwa pemerintah telah diberikan pelatihan-pelatihan dan juga sosialisasi kepada pegawai mengenai pengelolaan laporan keuangan, terdapat manfaat dari pelatihan dan sosialisasi yang terlihat dari banyaknya responden yang setuju pada indikator pengetahuan dan sikap. Akan tetapi, di Kabupaten Pegunungan Bintang pemerintah tidak melakukan pengawasan lebih lanjut sehingga dapat dimungkinkan pegawai tidak mengasah keterampilan yang diberikan dari pelatihan dan sosialisasi. Di sisi lain, pengelolaan laporan didukung oleh adanya aplikasi pencatatan laporan keuangan sehingga pegawai merasa tidak perlu mengasah keterampilannya.

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Apabila kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka output atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik. Kapasitas sumber daya manusia diukur dengan indikator pendidikan, tanggungjawab, pelatihan dan pengalaman.

Berdasarkan data dari jawaban responden rata-rata pendidikan pegawai pengelola keuangan adalah lulusan S1, maka sudah dianggap cukup memadai untuk menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan bekal ilmu dan keahlian yang dimiliki. Jika pegawai memiliki tanggungjawab dan menjalankan tugasnya berdasarkan pedoman maka kapasitasnya semakin baik dan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Langkah-langkah yang digunakan pemerintah Kabupaten duna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan daerah antara lain:

- 1) Telah ada mekanisme untuk pengelolaan dan pengembangan SDM, namun baru sebatas dokumentasi, dimana pengembangan terhadap SDM tidak pernah dilakukan secara formal, 2) Pengelolaan dan pengembangan SDM telah dilakukan, namun tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya. Pegawai diikut sertakan dalam proses pengembangan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor jangka panjang (*alignment* dengan tujuan instansi, keinginan individu, dan target tim), selain itu kontrol terhadap SDM sendiri masih kurang dilakukan, 3) Pengelolaan dan pengembangan SDM telah dilakukan secara terorganisir dan sudah juga dilakukan kontrol. Namun pelaksanaannya masih belum dapat optimal dilihat sisi performa yang ada dan 4) Telah dilakukan mekanisme pengelolaan dan pengembangan SDM secara terorganisir dan sudah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi instansi. Instansi saat ini sedang melakukan tahap pengembangan secara terus menerus berdasarkan hasil evaluasi yang ada.

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia. Maka dari itu untuk meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi. Hal ini juga mendukung teori *stewardship* bahwa sumber daya manusia yang tidak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi akan senantiasa memaksimalkan kompetensi dalam hal menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasinya. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya masing-masing akan dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik guna mencapai tujuan organisasinya. Kompetensi tak hanya diperoleh dari jenjang

pendidikan tetapi bisa juga dari pelatihan yang diadakan oleh pemerintah setempat dapat diperoleh. pendidikan dan pelatihan berperan penting dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus memuat unsur-unsur yang telah diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia adalah berbasis akrual. Basis akrual berarti mengakui dan mencatat peristiwa ekonomi serta melaporkan pada saat transaksi atau peristiwa ekonomi itu terjadi.

Penerapan basis akrual diharapkan dapat memperlihatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini berarti semakin baik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas. Laporan keuangan dapat berkualitas karena transaksi yang dilaporkan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan juga disajikan secara jujur dan lengkap. Dengan demikian, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat mengurangi potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Khusnah, (2015) menunjukkan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Menurut Benjamin S. Bloom (Sudijono, 2009: 50) mengatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang pegawai dikatakan memahami SAP apabila pegawai tersebut mengerti dan dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci mengenai SAP dengan menggunakan pemahaman dan bahasa sendiri. Kenyataan yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, hanya sedikit pegawai yang memahami SAP yang berlaku dan salah satu penyebabnya yaitu karena terdapat aplikasi pencatatan laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP yang berlaku, maka pegawai yang hanya mengetahui tanpa memahami SAP yang berlaku tetap bisa menyusun laporan keuangan.

Hasil temuan empiris di lapangan menunjukkan bahwa, berdasarkan opini BPK, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Laporan Nomor 24. B/LHP/XIXJYP/07/2016 Tanggal 17 Juli 2016 dan Nomor 24.C/LHPXIXJYP/07/2016 Tanggal 17 Juli 2016) (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP) Kabupaten Pegunungan Bintang, 2016). (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP) Kabupaten Pegunungan Bintang, 2017)

Opini BPK dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Laporan Nomor 05. B/LHP/XIXJYP/05/2017 dan Nomor 05.C/LHP/XIXJYP/05/2017 Tanggal 24 Mei 2017) (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP) Kabupaten Pegunungan Bintang, 2017). (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP) Kabupaten Pegunungan Bintang, 2018)

Opini BPK dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Laporan Nomor 05. B/LHP/XIXJYP/05/2019 dan Nomor 05.C/LHP/XIXJYP/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019) (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP) Kabupaten Pegunungan Bintang, 2019). (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP) Kabupaten Pegunungan Bintang, 2019).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Dengan begitu, maka penyelenggaraan keuangan atas kegiatan pemerintahan dapat mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. Indikator untuk mengukur variabel ini didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sistem pengendalian intern yang memadai dapat berperan dalam memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia. Hal tersebut berupa pelatihan juga diperlukan untuk mempertahankan kompetensi sumber daya manusia dari ilmu yang kian hari semakin berkembang. Sehingga dari sistem pengendalian intern mampu memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Semakin baik penerapan SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Risma Sri Mutiarani (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel SPIP secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2011) Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang dirancang oleh manajemen untuk mencapai tujuannya dan berfungsi untuk menghindari adanya penyimpangan dalam suatu instansi. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai pula pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil empiris berdasarkan laporan atas SPI dan kepatuhan, memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan Laporan Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, disajikan dalam Laporan Nomor 24. B/LHP/XIXJYP/07/2016 Tanggal 17 Juli 2016 dan Nomor 24.C/LHPXPCJYP/07/2016 Tanggal 17 Juli 2016.

Laporan hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan Laporan Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, disajikan dalam Laporan Nomor 05. B/LHP/XIXJYP/05/2017 Tanggal 24 Mei 2017 dan Nomor 24.C/LHPXIXJYP/07/2017 Tanggal 17 Juli 2017. Laporan hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan Laporan Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, disajikan dalam Laporan Nomor 03. B/LHP/XIXJYP/05/2018 dan Nomor 03.C/LHPXPXJYP/07/2018 Tanggal 17 Juli 2018. Serta laporan hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan Laporan Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, disajikan dalam Laporan Nomor 05. B/LHP/XIXJYP/05/2019 dan Nomor 05.C/LHPXIXJYP/07/2019 Tanggal 09 Mei 2019. Dari hasil temuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sudah baik dari segi kepatuhan. Akan tetapi, secara keseluruhan Pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang masih terdapat catatan pengecualian pada aset dan persediaan. Sehingga opini yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pengaruh Penerapan SIMDA, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan SPIP secara simultan terhadap Kualitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan SIMDA, sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan SPIP secara simultan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini

menunjukkan bahwa, kualitas laporan keuangan daerah akan baik jika didukung oleh dengan adanya penerapan SIMDA, sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan SPIP yang baik pula.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah ditingkat akuntansi (OPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Sumber Daya Manusia merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang memiliki kompetensi SDM yang baik sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena dapat menerapkan logika akuntansi dengan baik dan benar. SDM yang berkompeten juga menggunakan pengetahuannya untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, menggunakan keterampilannya untuk menjalankan tugas dengan baik dan benar juga menghindari kekeliruan penerapan prinsip akuntansi dan menunjukkan sikap yang baik kepada semua orang. Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang dirancang oleh manajemen untuk mencapai tujuannya dan berfungsi untuk menghindari adanya penyimpangan dalam suatu instansi. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai pula pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya bahwa, jika penerapan sistem informasi manajemen daerah semakin baik maka akan diikuti dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Artinya bahwa, jika pegawai memiliki tanggungjawab dan menjalankan tugasnya berdasarkan pedoman maka kapasitasnya semakin baik dan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Artinya bahwa, semakin baik dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah, maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat mengurangi potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Artinya bahwa, Semakin baik penerapan SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
5. Sistem informasi manajemen keuangan daerah, sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Artinya bahwa, bahwa sistem informasi manajemen keuangan daerah, sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, dengan demikian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang diharapkan dapat meningkatkan sistem informasi manajemen keuangan daerah pada setiap OPD dan melakukan pembinaan aplikasi secara berkala, agar setiap pegawai yang terkait dengan sistem aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dapat menguasai aplikasi dengan baik.
2. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai karakteristik kualitatif laporan keuangan, maka pemerintah daerah perlu menata kembali pengelolaan akuntansi dan pelaporan baik dari sistem komputerisasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai serta menerapkan seluruh komponen pengendalian sistem informasi yang ada dan juga sistem pengendalian intern secara keseluruhan. ASN pada OPD Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mengembangkan pengetahuan mengenai pengelolaan dengan konsultan agar pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan daerah dapat meningkat sehingga ke depan dapat menyusun secara mandiri tanpa melalui jasa konsultan.
3. Adanya sumber daya manusia yang memadai, didukung oleh ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan keuangan kepada pegawai di masing-masing OPD, sehingga kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki memenuhi kriteria yang dibutuhkan.
4. Penelitian selanjutnyadiharapkan dapat memperluas lingkup penelitian dan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak diteliti oleh penulis.

Daftar Pustaka

- Budiman, Fuad dan Arza Indra. (2013). *Pendekatan Technology Acceptance Model Dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah*. Jurnal WRA. Volume 1. Nomor 1.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E. Sharpe. Inc.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38909/Reference.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Erlina Rasdianto. (2013) , *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Penerbit Brama Ardian.
- Ghozali, Imam. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harlinda Harlinda (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)*, *SOROT Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, volume 11 no2. 2016 LPPM Universitas Riau ejournal.unri.ac.id.
- Hood, C. 1991. *A public Management for All Seasons*. *Public Administration*, Vol.69: 3-19. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116687-T%2024602-Evaluasi%20praktik-Bibliografi.pdf>.
https://www.google.com/search?safe=strict&ei=6NQuXYyEC4nSvqSL8p2QDQ&q=situs+BPKP&oq=situs+BPKP&gs_l=psyab.3...952990.955687..956075...0.0..0.144.358.1j2.....0..1..gws-wiz.....0i71.yK4M5rI-yEU.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir)*. Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak. Diunduh dari (http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file-file/artikel_abstrak/Isi_Artikel_649299136533.pdf).
- Kaho, Joseph R. (2010). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keban Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Lailatul khusnah, (2015). *Pengaruh Standar akuntansi, Audit Intern, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening pada SKPDPemerintah Kabupaten Malang*. Thesis, Universitas Airlangga.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP) Kabupaten Pegunungan Bintang, 2018.
- Lilis Setyowati, Wikan Isthika dan Ririh Dian Pratiwi.(2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang*. *Jurnal Kinerja* Volume 20, No.2, Th. 2016: Hal. 179-191.
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mulyadi. (2010), *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mutiarani Sri Risma. (2016), *Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dan Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten)*. Thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAS, Bandung. <http://repository.unpas.ac.id/14407/>.
- Notoatmodjo. Soekidjo. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Keempat. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, Darya Setya dan Apriyanti Susanti. 2010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Program Studi Universitas Komputer Indonesia. Bandung. <http://digilib.unila.ac.id/10783/19/.pdf>.
- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin. <http://eprints.umk.ac.id/7822/7/.pdf>.
- Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rusdiana dan Moh Irfan. (2014), *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana Adiputra dan Edy Sujana. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014). <http://eprints.ums.ac.id/47186/8/.pdf>.
- Sedermayanti (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Setiawati, E., & Sari, S. P. (2014). *Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia , Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi*. Seminar Nasional, 425-444.
- Sintike M.Modo, David P.E.S dan Agus T.P (2016) *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasiLaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)*, <https://www.google.com/Fejournal.unsrat.ac.id>.
- Susanto Azar. (2009), *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung : Lingga Jaya.
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan,. 2014” *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng)*” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014).eprints.ums.ac.id/47414/11/7.pdf.
- Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia Teori,Psikologi, Hukum, Ketenagakerjaan, Aplikasi Penelitian : Aplikasi dalam Organisasi Bisnis, Pemerintahan, dan Pendidikan*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.